

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Suato Lama Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin Berdasarkan Ratio *Financial Independence, Effectiveness, Efficiency* Periode 2021-2023

Riri Velina Sari¹*, Yusri Yusri², Sari Yanti³, Nadya Novianty⁴
^{1,2,3,4}) Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia
¹⁾ ririvelina28@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the level of independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio. Suato Lama Village's finances are based on original village income and transfer income. A financial report is a budget realization report prepared entity by presenting a budget realization report based on the basis specified in statutory regulations. There are different results in three ratios, namely financial independence ratio, effectiveness, and efficiency. Where results of a very low level of financial independence indicate that Suato Lama Village was still very dependent on financial assistance from the central and regional governments to finance government administration, development, and community empowerment activities. This type of research uses quantitative descriptive research. Data collection techniques in this research used documentation and interview techniques. Documentation technique used Suato Lama Village APBDes financial report for 2021-2023 budget. Technical data analysis used is financial ratio analysis. Based on financial ratio analysis, it can be concluded that the performance of the Suato Lama Village Government for the 2021-2023 fiscal year with an independence ratio is still very low with an average value of 1.85%. Financial performance Suato Lama Village Government for the 2021-2023 fiscal year has been very effective with an average value of 108.01%. Financial performance Suato Lama Village Government for the 2021-2023 budget year based on efficiency ratio stated to be quite efficient with an average ratio of 87.39%. In the independence ratio, it is stated that the Suato Lama Village Government is still not optimal in managing the village's original income sources. Meanwhile, the effectiveness and efficiency ratio states that the Suato Lama Village Government can carry out its duties in terms of realizing the village's original income.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan Desa Suato Lama berdasarkan pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Laporan keuangan adalah laporan realisasi anggaran yang disusun oleh entitas dengan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan hasil dalam tiga rasio yaitu ratio financial independence, effecttiveness, dan efficiency. Dimana hasil tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah menunjukkan bahwa Desa Suato Lama masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemerdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yang digunakan berupa laporan keuangan APBDes Desa Suato Lama anggaran 2021-2023. Dengan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Berdasarkan analisis rasio keuangan dapat dihasilkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021-2023 dengan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah dengan nilai rata-rata sebesar 1,85%. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021-2023 sudah sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 108,01%. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021-2023 berdasarkan rasio efisiensi dinyatakan cukup efisien dengan rata-rata rasio sebesar 87,39%. Dalam rasio kemandirian dinyatakan bahwa Pemerintah Desa Suato Lama masih belum maksimal mengelola sumber pendapatan asli desanya. Sedangkan dalam rasio efektivitas dan efisiensi dinyatakan bahwa Pemerintah Pemerintah Desa Suato Lama mampu melaksanakan tugasnya dalam hal merealisasikan pendapatan asli desa.

Kata kunci: *Ratio Financial Independence, Ratio Effectiveness, Ratio Efficiency*

1. PENDAHULUAN

Jargon bisnis digunakan dalam laporan keuangan, misalnya. Pengguna dapat mengakses data olahan status keuangan suatu perusahaan melalui laporan keuangan. Berbagai pemangku

kepentingan dapat memahami status keuangan suatu perusahaan dengan memahami laporan keuangannya (Murhadi, 2019). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan keuangan merupakan kebutuhan lain yang harus

dimasukkan dalam kewajiban bersama perusahaan. Dalam menyajikan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah harus memuat komponen-komponen laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh perusahaan dan disajikan sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu komponen laporan keuangan. Aturan ini menjadi pedoman penyajian laporan realisasi anggaran yang benar. Perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pemantauan adalah beberapa tugas administratif yang masuk ke dalam pengelolaan keuangan. Puncaknya adalah proses pertanggungjawaban (pelaporan) atas perputaran dana atau uang yang masuk dan keluar pada suatu lembaga (organisasi atau individu) dalam kurun waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200 disebutkan: "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa." Hal itu yang disarankan dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Karena desa mempunyai pemerintahan sendiri, maka desa menjadi salah satu komponen unsur konstitusi. Desa tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan diri dan kemudian menata kembali bila diperlukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi masyarakat kekuasaan penuh dalam pembangunan, redistribusi sumber daya, serta pengakuan dan rasa hormat. Undang-undang ini menunjukkan dengan jelas bahwa desa di Indonesia dapat menjadi landasan perekonomian negara. Desa kini lebih menjadi subjek pembangunan, bukan objek, yang mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan desa (Endah, 2018). Pemerintah federal mulai memberikan subsidi desa pada tahun 2015 untuk mendorong pemerataan pembangunan desa, khususnya bagi desa-desa yang tergolong desa tertinggal, dalam upaya mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai fokus pembangunan (Asmawati & Basuki, 2019). berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan "keuangan desa" adalah hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara nyata, seperti uang dan/atau hasil yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Kegiatan operasional yang menyangkut pendapatan, aturan, pelaksanaan, perencanaan, perincian, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara bersama-sama disebut dengan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa, khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, bertanggung jawab mengawasi keuangan desa (Manan et al., 2022). Jika keuangan desa dikelola dengan baik maka desa akan maju. Pengelolaan keuangan desa memerlukan bantuan dari berbagai

sumber, antara lain pendanaan yang cukup dan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Ketersediaan dana sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pengelolaan keuangan yang sehat di desa. Cara pengelolaan dana desa akan menunjukkan seberapa baik pelaksanaan tata kelola. Sumber pendapatan dan pembagian pengeluaran desa selama setahun tercantum dalam APBDes, rencana keuangan desa. Penyelesaian APBDes dan pertanggungjawabannya memberikan informasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, masyarakat mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap APBDes. Menurut Telaumbanua dkk. (2023), pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, yang dibuktikan dengan kinerja keuangannya.

Dalam Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Suato Lama terdapat fenomena yang dapat dijelaskan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang kuat memerlukan sejumlah elemen, antara lain akuntabilitas, keterbukaan, keterlibatan, dan efisiensi.

Pada akhirnya, akuntabilitas antara masyarakat dan pemerintah akan dihasilkan dari transparansi. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan dalam mematuhi peraturan hukum. Transparansi adalah tindakan memberikan informasi pengelolaan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat (Relandani & Rohman, 2020). Dalam pengertian ini, pemerintah Desa Suato Lama menggunakan informasi hasil analisis kinerja keuangan untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan keuangan pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian pemerintah desa yang dihasilkan dari pelaksanaan rencana anggaran yang disusun menentukan kinerja keuangannya. Apabila pemerintah desa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kinerjanya dianggap memuaskan. Sebaliknya, jika pemerintah desa tidak mencapai tujuan tersebut, maka kinerja pemerintah akan berada di bawah standar. Tinjauan kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah desa. Analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan desa merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja keuangan. Rasio independensi, efektivitas, dan efisiensi merupakan rasio keuangan yang dianalisis (Telaumbanua et al., 2023). Desa Suato Lama menjadi subyek investigasi ini. Rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi akan digunakan untuk menganalisis APBDes yang dikembangkan Desa Suato Lama guna mengetahui

tingkat kinerja keuangan pemerintahan desa. Jika terdapat kekurangan yang teridentifikasi, hal tersebut dapat menjadi peta jalan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Tabel 1. laporan realisasi (APBDes) Desa Suato Lama Tahun 2021-2023

URAIAN	TAHUN		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	12.167.000,00	24.472.240,00	45.386.603,00
Pendapatan Transfer	1.339.606.664,00	1.316.416.226,00	2.185.960.334
Dana Desa	757.676.454,00	726.088.000,00	815.916.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi/Alokasi Dana Desa	22.614.611,00	51.520.927,00	62.752.145,00
Alokasi Dana Desa	559.315.599,00	538.807.299,00	1.271.229.189
PENDAPATAN	21.181.858,74	214.362,48	0,00
LAIN-LAIN			
Jumlah Pendapatan	1.372.955.522,74	1.341.102.828,48	2.231.346.937
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	180.128.132,00	225.593.643,00	653.199.639
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	15.916.273,00	25.011.250,00	117.634.189,9
Bidang Pemerdayaan Masyarakat			4
Bidang Masyarakat	137.955.500,00	212.183.349,00	335.307.568
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak			
Jumlah belanja	1.146.746.634,35	1.323.736.426,93	2.229.156.489,94
Surplus/(Defisit)	226.208.888,39	17.366.401,55	2.190.447,06
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	44.234.263,00	70.443.151,39	87.809.552,94
Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	0,00	90.000.000,00
Pembiayaan Neto	(155.765.737,00)	70.443.151,39	(2.190.447,06)
Silpa/Sila Tahun Berjalan	70.443.151,39	87.809.552,94	31.086.743,06

Sumber: Data diolah (2024)

Dari data anggaran Desa Suato Lama kecamatan Salambabaris bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah Desa Lama. Kinerja keuangan Desa Suato Lama pada tahun anggaran 2021–2023 didasarkan pada persentase kemandirian yang termasuk dalam kategori imbal hasil, yaitu sebesar 1,85%. Persentase kemandirian yang disebabkan oleh pemerintah Desa Suato Lama adalah sebesar 0,9% pada tahun 2021, 1,85% pada tahun 2022, dan 2,8% pada tahun 2023. Nilai tukar yang sangat rendah menunjukkan bahwa Desa Suato Lama masih sangat rentan terhadap dana desa. pemerintah daerah dan daerah dalam hal pelaksanaan reformasi pemerintahan, proyek pembangunan, dan pengembangan masyarakat. Karena pendapatan desa asli Desa Suato Lama

sangat kecil dibandingkan dengan uang transfer dari pemerintah pusat dan daerah, maka kemandirian finansial masyarakat sangat kecil. Tidak mungkin mendanai seluruh pembangunan desa dan inisiatif pemerintah dengan sumber pendapatan pertama. Dengan rasio sebesar 105,68%, kinerja keuangan Desa Suato Lama tahun anggaran 2021 pada grafik di atas termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan awal Desa Suato Lama melebihi jumlah yang dialokasikan. Nilai rasio efektivitas meningkat signifikan menjadi 113,56% pada tahun 2022 dan masuk dalam kelompok Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan awal masyarakat Suato Lama sangat efektif jika dibandingkan dengan perkiraan, karena masyarakat akan mampu merealisasikan pendapatan asli yang diperoleh pada tahun 2022 dibandingkan dengan yang dianggarkan. Derajat efektivitas keuangan Desa Suato Lama diperkirakan akan kembali menurun pada tahun 2023, namun masih tergolong efektif dengan rasio efektivitas sebesar 104,79% pada tahun 2023. Dengan demikian, rata-rata rasio efektivitas pada tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah sebesar 108,01% yang tergolong sebagai sangat. Desa Suato Lama mampu merealisasikan pendapatan awal desa yang dianggarkan karena masuk dalam kategori sangat efektif.

Berdasarkan rasio efisiensi pada grafik di atas, kinerja keuangan Desa Suato Lama tahun anggaran 2021–2023 tergolong kurang efisien. Nilai rasio tahun 2021 sebesar 93,89%; untuk tahun 2022 sebesar 92,11%; dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 76,69% sehingga masuk dalam kategori efisien. Hal ini menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan Desa Suato Lama sepadan dengan uang yang dikumpulkan. Dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 87,39%, maka kinerja keuangan Desa Suato Lama tahun anggaran 2021–2023 tergolong cukup baik. Tingkat efisiensi yang masih berada pada kisaran cukup efisien menunjukkan bahwa pemerintahan desa di Desa Suato Lama harus mengeluarkan biaya atau pengeluaran daerah yang besar agar dapat menghasilkan pendapatan yang diharapkan. Pendapatan riil yang diperoleh lebih besar 87,39% dibandingkan biaya yang dikeluarkan, padahal realisasi pendapatan masih cukup untuk menutupi biaya. Hal ini menempatkan realisasi pendapatan pada kelompok cukup efisien. Jika rasio efisiensinya kurang dari 80% maka dikatakan efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk menilai kinerjanya dan melakukan perbaikan yang diperlukan, sehingga memungkinkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di masa mendatang dan meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan (Susanto, 2019).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori stewardship

Dalam (NYuniarta G 2022), yang mendefinisikan skenario di mana manajemen tidak didorong oleh ambisi individu tetapi lebih fokus pada hasil besar untuk kepentingan organisasi, merupakan komponen teori keagenan lain yang mendukung penelitian ini. Alasan di balik penggunaan teori stewardship terhadap tantangan penelitian adalah bahwa para manajer, yang bertindak sebagai pelayan dan merupakan penerima kepercayaan. Menurut teori stewardship, manajemen organisasi akan beroperasi demi kepentingan terbaik organisasi dengan bertindak sebagai "pengurus/administrator layanan" dan dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kearifan yang lengkap. Keberadaan pemerintahan desa (pengurus) sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan bertindak untuk kepentingan umum dengan melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat (kepala sekolah) dapat dijelaskan melalui implikasi teori penatalayanan. Untuk penelitian ini. Pemerintah desa memenuhi tanggung jawab akuntabilitas keuangannya dengan memberikan laporan keuangan yang transparan dan tabular yang memenuhi persyaratan pelaporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Hubungan teori stewardship dengan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi adalah pemimpin yang bertindak sebagai steward (pelayan) cenderung mengelola sumber daya perusahaan dengan lebih hati-hati dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio kemandirian. Stewardship theory mengedepankan pengambilan keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Keputusan-keputusan ini seringkali mencerminkan kepentingan terbaik dari seluruh pemangku kepentingan, yang dapat mengarah pada stabilitas finansial yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dengan menumbuhkan budaya kepercayaan dan kolaborasi, pemimpin yang berperan sebagai steward dapat meningkatkan kinerja organisasi. Stewardship theory mendorong investasi dalam pengembangan internal, seperti pelatihan dan pengembangan karyawan. Secara keseluruhan, teori stewardship dapat membantu meningkatkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dengan memastikan bahwa pengelolaan organisasi berfokus pada keberlanjutan jangka panjang, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan.

Teori Accountability

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib dan teranggarkan, dengan berpegang pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Sebuah metrik yang menggambarkan

seberapa dekat pemberian layanan mematuhi norma-norma atau nilai-nilai eksternal yang dianut oleh pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan layanan adalah konsep akuntabilitas publik. Iznilah & Rekan (2018). Konsep akuntabilitas mengacu pada tugas yang dibebankan pada orang atau organisasi yang bertugas mengawasi sumber daya publik dan orang-orang yang bersangkutan, untuk dapat menanggapi pertanyaan tentang tugas mereka. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa dapat dilihat sebagai wujud kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa yang dipercayakan kepadanya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media akuntabilitas secara berkala.

Teori akuntabilitas (accountability) memiliki hubungan yang signifikan dengan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Teori ini menekankan transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Hubungan dengan rasio kemandirian akuntabilitas mendorong pelaporan yang jujur dan transparan mengenai sumber pendapatan dan penggunaan dana. Ini membantu pemangku kepentingan memahami sejauh mana organisasi bisa membiayai dirinya sendiri tanpa bantuan eksternal. Dengan akuntabilitas yang baik, organisasi dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan meningkatkan rasio kemandirian. Hubungan rasio efektivitas dengan teori akuntabilitas menuntut adanya sistem pengukuran kinerja yang jelas dan teratur. Ini memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi apakah tujuan dan sasaran mereka tercapai. Akuntabilitas yang tinggi biasanya melibatkan mekanisme umpan balik dari pemangku kepentingan, yang membantu organisasi menyesuaikan strategi dan operasinya untuk meningkatkan efektivitas.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sujarweni (2017:33) menyatakan bahwa pemegang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintah tentang seluruh kegiatan desa, termasuk pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya dalam bentuk rencana program yang dibiayai desa. dana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menurut Yulianyah & Rusmianto (2015), merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Di dalamnya memuat sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutupi kebutuhan serta pengeluaran yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama setahun. jumlah uang atau pendanaan yang dibutuhkan jika diperkirakan terjadi kekurangan atau kelebihan.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut (Faradhiba & Diana, 2018). APBDes berfungsi sebagai berikut:

- a) Alat perencanaan
- b) Alat pengendalian
- c) Alat kebijakan fiscal
- d) Alat koordinasi dan komunikasi
- e) Alat penilaian kinerja
- f) Alat motivasi

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pendapatan desa, belanja desa, dan keuangan desa merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rapat perencanaan pembangunan desa meliputi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Setiap tahun kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa memutuskan APBDes Desa dan Peraturan Desa. Peraturan Bupati/Walikota Ramadhani dkk., (2020b) mengatur tata cara penyusunan APBDes, perubahan APBDes, penghitungan APBDes, dan pembagian tanggung jawab pelaksanaan APBDes.

3. METODOLOGI

Penelitian yang mencoba menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini dengan menggunakan angka-angka untuk mendapatkan gambaran dan ciri-ciri situasi yang diteliti dikenal dengan penelitian deskriptif kuantitatif. Data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kecamatan Salambabaris kabupaten Tapin tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 digunakan peneliti dalam penelitian ini dalam bentuk laporan. Memilih subjek, latar belakang, pernyataan masalah, dan tujuan penelitian merupakan langkah pertama dalam proses desain penelitian. Selanjutnya melakukan tinjauan literatur untuk membuat kerangka teori. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data laporan keuangan APBDes. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data menggunakan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi analisis data tersebut menggunakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil dari menganalisis rasio keuangan, efektivitas dan efisiensi menarik kesimpulan apakah desa Suato Lama berada pada level rendah, efisien atau efektif.

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Data numerik atau data numerik yang berbentuk data disebut dengan data kuantitatif. Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Kantor Desa Suato Lama, Kecamatan Salambabaris, Kabupaten Tapin periode 2021–2023 menjadi sumber data kuantitatif dalam penelitian ini. Rasio efikasi, efisiensi, dan kemandirian keuangan desa dianalisis menggunakan data untuk menilai kinerja keuangan pemerintah

desa. Data yang dikumpulkan, disiapkan, dan dianalisis disebut data deskriptif. Informasi yang sudah ada, dapat diakses, atau dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain disebut data sekunder (Hesti Yulia Sabono dan Sahusilawane 2024). Data dokumentasi, atau data sekunder, terdiri atas catatan laporan realisasi keuangan atau laporan historis yang dihasilkan dalam arsip publik dan tidak dipublikasikan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Suato Lama menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, prosedur dokumentasi dan wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data (Ramadhani, Hisamuddin, dan Shulthoni 2020). Laporan keuangan APBDes Desa Suato Lama tahun anggaran 2021–2023 berfungsi sebagai pendekatan dokumentasi. Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. dengan menggunakan data laporan keuangan APBDes untuk menghitung rasio independensi, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya tabel berisi hasil perhitungan akan diimpor untuk dianalisis dan dijelaskan. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif untuk analisis datanya. Secara khusus data keuangan akan dianalisis dengan melakukan perhitungan terhadap data tersebut guna memecahkan permasalahan yang ada saat ini sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan diteliti dan dijelaskan.

Ratio Financial Independent (kemandirian)

Adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian finansial suatu masyarakat adalah keuangan desa. Rasio ini menunjukkan seberapa mandiri suatu desa dalam hal perolehan pendapatan dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer atau bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Kemampuan suatu desa dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi yang dimilikinya mungkin ditentukan oleh rasio kemandirian finansial yang tinggi. Desa yang stabil secara finansial tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah dan mampu merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan dengan lebih fleksibel. Namun, ketika menilai rasio kemandirian finansial, penting untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi desa. Karena setiap desa adalah unik dan mempunyai kemungkinan yang berbeda-beda, maka mungkin terdapat perbedaan dalam tingkat kemandirian finansial yang diinginkan. Ketika mengevaluasi rasio ini, karakteristik lokal harus dipertimbangkan dan perbandingan dengan kota-kota sebanding atau tolok ukur yang relevan harus dilakukan. (Mardiasmo 2021). Rumus untuk mengetahui rasio kemandirian desa adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Ratio Effectiveness (Efektivitas)

Efektivitas menurut Mahmudi (2019) adalah hubungan antara tujuan dan keluaran. Suatu organisasi, program, atau aktivitas akan menjadi lebih efektif jika produknya berkontribusi terhadap pencapaian tujuannya. Efektivitas berfokus pada hasil, sedangkan ilmu ekonomi berkonsentrasi pada input dan efisiensi pada output atau proses. Ketika suatu organisasi, program, atau kegiatan menghasilkan hasil yang memenuhi tujuan yang telah ditentukan atau dianggap mengeluarkan uang secara bijaksana, maka hal tersebut dianggap efektif. Jika pendapatan asli daerah/desa yang direncanakan dan dianggarkan dibandingkan, maka rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah/desa mampu merealisasikan pendapatan asli daerah yang dimaksud (Susanto 2019).

Efektivitas suatu organisasi merupakan ukuran seberapa baik atau buruknya kinerja organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berfungsi secara efisien. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah suatu program atau kegiatan efektif adalah apakah tujuannya telah tercapai. Mardiasmo, 2017, hal. 134. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa efektivitas bergantung pada korelasi antara hasil yang diantisipasi dan hasil aktual. Oleh karena itu, efektivitas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditentukan adalah efektivitasnya. Dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya, rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mampu mewujudkan pendapatan asli daerah yang diharapkan. Mencapai rasio 1 atau 100% dianggap berhasil; meskipun demikian, rasio efektivitas yang lebih besar lebih disukai.

Ratio Efficiency (Efisiensi)

Mahmudi (2019) mendefinisikan efisiensi sebagai rasio output terhadap input, atau alternatifnya, sebagai jumlah output yang diproduksi per unit input. Jika suatu program, organisasi, atau kegiatan dapat mencapai hasil tertentu dengan jumlah masukan yang paling sedikit, atau jika program tersebut dapat memperoleh keluaran yang maksimal (menghabiskan secara bijak) dengan masukan yang diberikan, maka program tersebut dianggap efisien. Mahmudi (2019) menyatakan efisiensi ditentukan dengan membandingkan biaya output (produk yang dihasilkan) dengan input yang dikonsumsi.

Mahmudi (2019) mendefinisikan efisiensi sebagai penggunaan input dalam jumlah paling

sedikit untuk menghasilkan hasil tertentu atau memaksimalkan output dengan serangkaian input tertentu. Efisiensi adalah ukuran keluaran/masukan dalam kaitannya dengan kriteria atau tujuan kinerja yang telah ditentukan. Menurut otoritas yang disebutkan di atas, efisiensi dapat didefinisikan sebagai rasio input paling sedikit terhadap output paling banyak. Semakin efektif pemerintah daerah mengelola keuangan daerah, maka rasionya akan semakin rendah. Seperti yang diungkapkan Mahmudi (2019), Indikator efisiensi menjelaskan bagaimana masukan sumber daya suatu unit organisasi seperti personel, gaji, dan biaya administrasi berhubungan dengan keluaran yang dihasilkan. Masukkan indikator ini untuk memberikan rincian tentang bagaimana masukan diubah menjadi keluaran, khususnya efektivitas proses internal. Rasio input terhadap output merupakan cara menentukan efisiensi menurut Mahmudi (2019). Suatu organisasi akan lebih efisien jika outputnya lebih tinggi dibandingkan dengan inputnya. Hasilnya, efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Anggaran Belanja Desa}} \times 100\%$$

Tujuan efisiensi adalah memaksimalkan potensi output dari input tertentu. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara pengeluaran yang dianggarkan dan pengeluaran aktual. Jika rasionya kurang dari 1 atau kurang dari 100% maka kinerja pemerintah daerah dianggap efisien. Rasio kinerja meningkat dengan penurunan rasio efisiensi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menampilkan hasil analisis dan menjelaskan hasil tersebut yang mengarah kepada kesimpulan. Hasil dapat ditampilkan sebagai rumusan, pernyataan, gambar dan tabel yang akan dikomentari atau direkomendasikan. Gambar dalam Hasil dan Pembahasan dapat berupa kurva yang menyatakan keterkaitan variabel, gambar konstruksi atau desain yang semuanya bermakna sebagai hasil analisis yang menjawab persoalan penelitian. Pembahasan dilakukan untuk setiap hasil yang diperoleh dan dilakukan sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang telah diuraikan di dalam uraian Tinjauan Pustaka.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Desa Suato Lama

Tahun	Pendapatan Asli Desa (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Kriteria
2021	12.167.000	1.339.606.664	0,9%	Rendah Sekali
2022	24.472.240	1.316.416.226	1,85%	Rendah Sekali
2023	47.563.603	1.695.013.530	2,08%	Rendah Sekali

Sumber: Penulis (2024)

Berikut adalah contoh perhitungan:

Tahun 2021

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{12.167.000}{1.339.606.664} \times 100\% = 0,9\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{24.472.240}{1.316.416.226} \times 100\% = 1,85\%$$

Tahun 2023

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{47.563.603}{1.695.013.530} \times 100\% = 2,08\%$$

$$\text{Nilai Rata-Rata} = 0,9\% + 1,85\% + 2,08\% : 3 = 1,85\%$$

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pemerintah Desa Suato Lama

Tahun	Pendapatan Asli Desa (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2021	12.167.000	11.512.000,00	105,68%	Sangat Efektif
2022	24.472.240	21.550.000,00	113,56%	Sangat Efektif
2023	47.563.603	45.386.603,00	104,79%	Sangat Efektif

Sumber: Penulis (2024)

Berikut adalah contoh perhitungan:

Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{12.167.000}{11.512.000,00} \times 100\% = 105,68\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{24.472.240}{21.550.000,00} \times 100\% = 113,56\%$$

Tahun 2023

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{47.563.603}{45.386.603,00} \times 100\% = 104,79\%$$

$$\text{Nilai Rata-Rata} = 105,68\% + 113,56\% + 104,79\% : 3 = 108,01\%$$

Tabel 3. Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Suato Lama

Tahun	Pendapatan Asli Desa (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2021	1.146.746.634,35	1.221.279.365,00	93,89%	Sangat Efisien
2022	1.323.736.426,93	1.437.113.027,00	92,11%	Sangat Efisien
2023	1.709.649.397,98	2.229.156.489,94	76,69%	Efisien

Sumber: Penulis (2024)

Berikut adalah contoh perhitungan:

Tahun 2021

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.146.746.634,35}{1.221.279.365,00} \times 100\% = 93,89\%$$

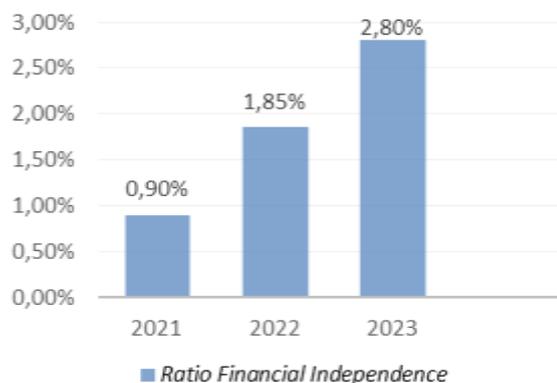
Tahun 2022

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.323.736.426,93}{1.437.113.027,00} \times 100\% = 92,11\%$$

Tahun 2023

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.709.649.397,98}{2.229.156.489,94} \times 100\% = 76,69\%$$

$$\text{Nilai Rata-Rata} = 93,89\% + 92,11\% + 76,69\% : 3 = 87,39\%$$



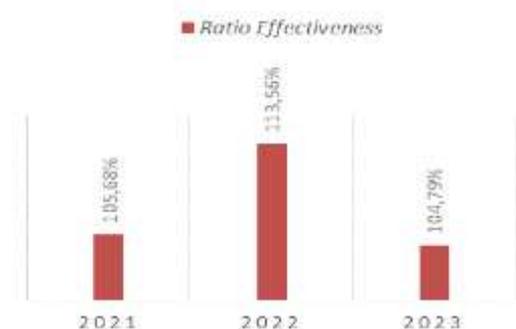
Sumber: penulis (2024)

Gambar 1. Grafik hasil perhitungan rasio financial independence (Kemandirian)

Tentang informasi anggaran Desa Suato Lama Kecamatan Salambabaris yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah Desa Suato Lama. Tahun anggaran 2021-2023 melihat kinerja keuangan Desa Suato Lama. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Desa Suato Lama sebesar 0,9% pada tahun 2021, 1,85% pada tahun 2022, dan 2,07% pada tahun 2023. Dengan nilai rata-rata rasio sebesar 1,86% termasuk dalam kategori sangat rendah menurut rasio kemandirian tersebut di atas. Tingkat kemandirian finansial yang sangat rendah di Desa Suato Lama menunjukkan betapa desa ini masih bergantung pada pendanaan dari pemerintah federal dan lokal untuk mendukung pembangunan, operasional pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan awal desa Suato Lama sangat kecil jika dibandingkan dengan uang transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga menyebabkan tingkat kemandirian finansial desa ini sangat rendah. Tidak mungkin mendanai seluruh pembangunan desa dan inisiatif pemerintah dengan sumber pendapatan pertama.

Kinerja Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021-2023 berdasarkan rasio kemandirian masih sangat buruk, berdasarkan hasil perhitungan dan temuan wawancara di atas. Jika dicermati, Uang Asli Desa (PAD) tahun 2021 sebesar Rp 12.167.000,00. Pasar desa pada hari Minggu, pasar ternak tahunan, dan BUMDES menyediakan uangnya. Sebelum dibagikan kepada pekerja BPD, pasar desa menghasilkan pendapatan 200.000 per minggu. Artinya pendapatan pasar 100.000 per minggu. Selain itu, juru parkir menyumbang 25%

pendapatan, sehingga pendapatan pasar bisa dibulatkan menjadi Rp. 150.000 per minggu dengan total pendapatan pasar tahunan sebesar Rp.7.200.000. Kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500 per liter atas pendapatan BUMDES yaitu Pertashop yang telah beroperasi sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini. Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada tahun 2022 sebesar Rp24.472.240,00 dari pendapatan pasar sebesar Rp240.000 per minggu. Dibagi Rp 120.000 per minggu untuk pegawai BPD dan 25% pendapatan parkir, sehingga total pendapatan pasar per minggu sebesar 170.000, dan pendapatan tahunannya menjadi Rp 8.160.000. dan karena pasar hewan sudah tidak buka maka pendapatannya Rp 0. untuk pendapatan dari BUMDES di tahun 2022 itu keuntungannya lumayan banyak yaitu sebesar Rp16.312.240 yang dimana pendapatan dari pertashopnya perliternya sebesar Rp500 dan mampu terjual 89,38 liter selama satu tahun. Di tahun 2023 untuk pendapatan asli desa (PAD) mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp47.563.603,00 yang dimana penghasil tersebut didapat dari pendapatan pasar yang sebesar Rp199.000 setelah dibagi dan sudah termasuk pendapatan parkir untuk pendapatan perminggunya sebesar Rp 796.000 dan untuk pendapatan pertahunnya sebesar Rp9.552.000 . Untuk pendapatan pasar hewannya sebesar Rp0 karena sudah tidak beroperasi lagi. Dan untuk pendapatan BUMDES sebesar Rp38.011.603 selama satu tahun ini untuk pendapatan perliternya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp500 per satu liternya dan pertashop mampu menjual 208,29 liter selama satu tahunnya. PADe yang diperoleh Pemerintah Desa Suato Lama tidak seberapa jika dibandingkan dengan pendapatan transfer, karena aliran pendapatan awal desa masih belum dikelola secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah federal dan lokal untuk memenuhi kebutuhannya.



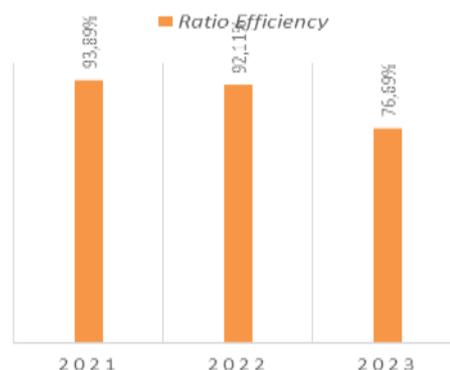
Sumber: Penulis (2024)

Gambar 2. Grafik hasil perhitungan ratio effectiveness (Efektivitas)

Dengan rasio efektivitas sebesar 105,68%, kinerja keuangan pemerintah Desa Suato Lama pada

tahun 2021 masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan awal Desa Suato Lama melebihi jumlah yang dialokasikan. Nilai rasio efektivitas meningkat signifikan menjadi 113,56% pada tahun 2022 dan masuk dalam kelompok Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan awal masyarakat Suato Lama sangat efektif jika dibandingkan dengan perkiraan, karena masyarakat akan mampu merealisasikan pendapatan asli yang diperoleh pada tahun 2022 dibandingkan dengan yang dianggarkan.

Efektivitas keuangan Desa Suato Lama akan meningkat kembali pada tahun 2023, dan dinilai sangat efektif dengan rasio efektivitas sebesar 104,79% pada tahun 2023. Oleh karena itu, nilai rata-rata rasio efektivitas antara tahun 2021 hingga 2023 adalah 108,01% yang tergolong sangat efektif. Desa Suato Lama tidak mampu menghasilkan pendapatan desa pertama yang dianggarkan karena kategori kurang efektif. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mukani, Kepala Desa Suato Lama, rata-rata realisasinya sudah tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja desa kegiatan tahun berjalan jika dilihat dari pendapatan awal desa. Berdasarkan temuan wawancara Kepala Keuangan/Bandes Desa Suato Lama yang mengatakan bahwa pendapatan awal desa pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terlampaui oleh realisasi pendapatan PAD, "Kinerja keuangan Pemerintah Desa Suato Lama Tahun 2021 –Tahun anggaran 2023 sudah sangat efektif yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa telah mampu melaksanakan tugasnya dalam hal mewujudkan pendapatan asli desa itu sendiri, sesuai dengan hasil perhitungan dan wawancara yang dilakukan di atas Program dan operasional untuk memulihkan pendapatan asli desa telah dilaksanakan secara efektif sehingga menghasilkan realisasi PADes yang melebihi jumlah yang dialokasikan.



Sumber: Penulis (2024)

Gambar 3. Grafik hasil perhitungan ratio Efficiency (Efisien)

Berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021–

2023 tergolong kurang efisien, dengan nilai rasio sebesar 93,89% pada tahun 2021 dan 92,11% pada tahun 2022. Rasio efisiensi akan turun menjadi 76,69% pada tahun 2021. 2023, memenuhi syarat untuk kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan Pemerintah Desa Suato Lama sepadan dengan pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan wawancara dengan kepala keuangan dan bandes Desa Suato Lama, tahun 2021 tergolong kurang efisien karena Covid-19 menyebabkan banyak acara desa ditunda. Akibatnya, tingkat efisiensi yang termasuk dalam hasil kurang efisien mampu menunjukkan bahwa dari segi penyebab besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Suato Lama adalah karena tidak ada kegiatan yang dilakukan. di tingkat kecamatan atau desa. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021–2023 tergolong sangat efisien berdasarkan rasio efisiensi yang rata-rata sebesar 87,39%. Desa Suato Lama di tahun 2021 dapat merealisasikan belanjanya sebesar Rp1.146.746.634,35 yang terbagi dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp585.946.729,35, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp180.128.132,00, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp15.916.273,00, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp137.955.500,00, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp226.800.000,00. Untuk anggaran belanja desa nya itu sebesar Rp1.221.279.365,00.

Ditahun 2022 belanja desa masuk dalam hasil kurang efisien untuk realisasi belanja desa nya sebesar Rp1.323.736.426,93 yang didapat dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp569.348.184,93, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp225.593.643,00, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp25.011.250,00, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp212.183.349,00, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp291.600.000,00. Dan untuk pendapatan dari anggaran belanja desanya sendiri sebesar Rp1.437.113.027,00. Jadi untuk tingkat kriteria rasio efisiensi ditahun 2022 Desa Suato lama tidak mampu merealisasikan belanja desanya sesuai yang sudah dianggarkan. Desa Suato Lama dikatakan kurang efisien dalam merealisasikan belanja desanya karena dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa realisasi nya sebesar Rp569.348.184,93, sedangkan anggarannya itu sebesar Rp612.301.223,00, bidang pembinaan kemasyarakatan realisasi nya sebesar Rp25.011.250,00, untuk anggarannya sebesar Rp41.175.236,00, bidang pemberdayaan masyarakat realisasi nya sebesar Rp212.183.349,00, sedangkan untuk anggarannya sebesar Rp239.152.500,00, dapat disimpulkan bahwa Desa Suato Lama dalam bidang

tersebut belum mampu merealisasikan anggaran belanja desa nya sendiri.

Ditahun 2023 realisasi belanja desa nya sebesar Rp1.709.649.397,98 yang didapat dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp713.849.834,98, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp415.226.905,00 bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp93.222.18,00, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp310.950.460,00, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp179.400.000,00. Dan untuk pendapatan dari anggaran belanja desanya itu sendiri sebesar Rp2.229.156.489,94. Jadi untuk tingkat kriteria rasio efisiensi ditahun 2023 desa Suato Lama masuk dalam hasil efisien karena Desa Suato Lama tidak mampu merealisasikan belanja desanya sesuai dengan yang sudah dianggarkan.

Pemerintah Desa Suato Lama harus mengeluarkan biaya atau belanja desa yang cukup besar agar dapat merealisasikan pendapatan yang diantisipasi, terlihat dari tingkat efisiensi yang masih berada pada kelompok cukup efisien. Rasio biaya-biaya tersebut terhadap pendapatan yang direalisasikan sebesar 87,56%, termasuk dalam kategori cukup efisien meskipun uang realisasi yang diperoleh cukup untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika rasio efisiensinya kurang dari 60% maka dianggap sangat efisien.

Dari pembahasan diatas dapat berhubungan dengan teori stewardship karena rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi adalah pemimpin yang bertindak sebagai steward (pelayan) cenderung mengelola sumber daya perusahaan dengan lebih hati-hati dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio kemandirian. Stewardship theory mengedepankan pengambilan keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Keputusan-keputusan ini seringkali mencerminkan kepentingan terbaik dari seluruh pemangku kepentingan, yang dapat mengarah pada stabilitas finansial yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal.

Dari pembahasan diatas juga berhubungan dengan Teori akuntabilitas (accountability) memiliki hubungan yang signifikan dengan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Teori ini menekankan transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Hubungan dengan rasio kemandirian akuntabilitas mendorong pelaporan yang jujur dan transparan mengenai sumber pendapatan dan penggunaan dana. Ini membantu pemangku kepentingan memahami sejauh mana organisasi bisa membiayai dirinya sendiri tanpa bantuan eksternal.

5. PENUTUP

Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021-2023 berdasarkan rasio kemandirian tergolong masih rendah sekali dengan nilai rata-rata sebesar 1,85%. Pemerintah Desa Suato Lama masih belum maksimal dalam mengelola sumber pendapatan asli desanya sehingga PADes yang diterima terbilang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021-2023 sudah sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 108,01%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Desa telah mampu melaksanakan tugasnya dalam hal merealisasikan pendapatan asli desa.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Suato Lama tahun anggaran 2021-2023 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan cukup efisien dengan rata-rata rasio sebesar 87,39%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Suato Lama mampu untuk merealisasikan pendapatan yang dianggarkan mengeluarkan biaya atau belanja desa yang cukup besar.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diberikan penulis, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Suato Lama diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendapatan asli desanya dengan cara memaksimalkan pengelolaan sumber pendapatan asli desa serta menggali dan mengembangkan potensi – potensi yang dimiliki desa guna menambah sumber pendapatan asli desa sehingga pendapatan asli Desa Suato Lama dapat meningkat.
2. Pemerintah Desa Suato Lama diharapkan dapat lebih menekan pengeluaran atau belanja desanya terutama untuk belanja operasional sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Dengan demikian, pemerintah Desa Suato Lama dapat mengoptimalkan pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang tidak terlalu besar

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, Z. (2018). Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Gamtala, Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. 03, 1–20.
- Anugeraheni Nyuniarta G. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol : 13.
- Asmawati, Ika, Dan Paryino Basuki. 2019. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, Isnn: 2685 – 1059.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4(November), 25–33. <https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Moderat> [diakses 03/05/2024]
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-Jra Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Ferdianto, B. (2016). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Barat. 68. <http://Digilib.Unila.Ac.Id/21324/3/SkripsiTanpaBabPembahasan.Pdf> [diakses 20/06/2024]
- Fitriani, F., Dewi, A. R., & Gunawan, T. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021. *Equilibria: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 9(2), 232–238. <https://Doi.Org/10.33373/Jeq.V9i2.4812> [diakses 02/07/2024]
- Iin Ivanda Listari & Kukuh Harianto Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3). <https://Doi.Org/10.51903/Jurnalmahasiswa.V4i3.396> [diakses 02/06/2024]
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29-
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.

- <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V2i1.15>[diakses /02/06/2024]
- Kenale, M. M., Herdi, H., & Lamawitak, Paulus Libu. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdes (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 62–77.
- Kasmir 2017, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan kke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martiastuti, H. I., Nugroho, A., & Widyawati, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), 29–36. <https://doi.org/10.17969/Jimfp.V6i2.16990>[diakses 05/06/2024]
- Manan, L. O. Ab., Djauhar, A., & Nurlela, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa. *Sultra Journal Of Economic And Business*, 3(1), 8–19. <https://doi.org/10.54297/Sjeb.Vol3.Iss1.227> [diakses 13/013/2024]
- Muhardi, Werner R. 2019. Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi . (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru. Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Mardiasmo (Ed.)). Buku. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemerintah Kecamatan Salambabaris. 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Kecamatan Salambabaris. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintahan Desa Suato Lama. 2021. Laporan Realisasi Anggaran Dan Belanja Desa (Apbdes). <https://suatolama.gides.id/highlight/content/641>[diakses 20/05/2024]
- Pemerintahan Desa Suato Lama. 2022. Laporan Realisasi Anggaran Dan Belanja Desa (Apbdes). <https://suatolama.gides.id/highlight/content/641> [diakses 20/06/2024]
- Pemerintahan Desa Suato Lama. 2023. Laporan Realisasi Anggaran Dan Belanja Desa (Apbdes). <https://suatolama.gides.id/highlight/content/641>[diakses 20/5/2024]
- Relandani, A., & Rohman, F. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17(01), 75–90.
- Rahayu, Finky Yogi Kharisma, Dkk. 2019. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014 – 2018”. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Infomasi*, Vol. 15, Hlm. 443 – 450.
- Ramadhani, D.A.S., Hisamuddin, N. And Shulthoni, M. (2020b) ‘ Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)’ , *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), P. 1. Available At: <https://doi.org/10.19184/Jauj.V17i1.10687>. [diakses 08/05/2024]
- Republik Indonesia 2014. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanto, Hery. 2019. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram”. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 7, No.1, Issn: 2477 – 1767.
- Sartika, Novira. 2019. “Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti”. *Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol. 7, Issn: 2614 – 6983.
- Sabono, Hesti Yulia & Sahusilawane, ‘ Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Desa’, 2.1 (2024), 326-36
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. In Jakarta: Salemba Empat.